

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia yang tidak menentu, semakin banyaknya skandal manipulasi akuntansi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar untuk itu perusahaan dituntut menyajikan laporan keuangan yang benar, jujur dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Informasi laporan keuangan harus disajikan dengan benar dan bebas tanpa rekayasa agar dapat memenuhi fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari perusahaan, oleh karena itu dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan jujur kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur merupakan definisi dari integritas laporan keuangan (Mudasetia dan Solikhah, 2017).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mereka (SAK, 2017).

Laporan keuangan digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga berperan penting dalam pekerjaan seorang manajer, manajer menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya atas sumber daya pemilik. Penerapan

prinsip akuntansi yang konsisten merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan tidak terlepas dari pengalaman, alasan dan kegunaan prinsip tersebut. Prinsip tersebut dikenal dengan nama Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Salah satu bagian dari *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) di Indonesia yaitu PSAK, dimana terdapat suatu prinsip yang mengharuskan akuntan membuat keputusan dalam banyak penilaian yang mempengaruhi laporan keuangan. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama konservatisme akuntansi (Istiantoro dkk, 2017).

Berbagai informasi yang tersedia dalam laporan keuangan diperlukan para pengguna seperti investor, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar. *International Accounting Standard Board* (IASB) menetapkan dua fundamental *qualities* yang harus dimiliki informasi yang termuat dalam laporan keuangan agar berguna dalam pembuatan keputusan, yaitu *relevance* dan *faithful representation* (Budiarto, 2017).

Meskipun demikian, terdapat fenomena di perusahaan Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan hal ini merupakan tindakan illegal dan

menyalahi arti dari integritas laporan keuangan. PT. Garuda Indonesia resmi dinyatakan bersalah atas kecurangan pengakuan pendapatan tahun 2018 atas kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT. Mahata Aero Teknologi dengan PT. Citilink, anak usaha Garuda. Garuda mengakui pendapatan atas perjanjian tersebut sebesar USD 239,94 juta dan USD 28 juta lainnya merupakan pendapatan bagi hasil dari PT. Sri Wijaya dimana diketahui perjanjian belum berakhir namun hingga tutup buku 2018 selesai, tidak ada satu pembayaran dan jaminan perjanjian oleh pihak Mahata. Mahata hanya memberikan surat pernyataan komitmen dimana perjanjian dapat berubah dengan mengacu pada kemampuan finansial Mahata. Dari kerjasama tersebut Garuda mengakui pendapatan dengan Mahata sebagai penghasilan dari kompensasi atas pemberian hak oleh Garuda ke Mahata sedangkan diketahui tidak ada satu pembayaran dan jaminan perjanjian oleh pihak Mahata. Garuda terbukti melakukan pelanggaran peraturan OJK atas pengakuan pendapatan tersebut sehingga OJK melayangkan sanksi denda administratif sebesar Rp 100 juta. Selain itu Direksi dan Komisaris PT. Garuda Indonesia yang tanda tangan laporan keuangan Garuda dikenakan masing-masing denda Rp 100 juta karena melanggar aturan Bapepam dan denda Rp 100 juta sebagai saksi administratif untuk masing-masing Direksi dan Komisaris karena melanggar aturan OJK tentang laporan tahunan perusahaan publik atau emiten. Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda sebesar Rp 250 juta dengan catatan menyajikan kembali laporan keuangan interim PT. Garuda Indonesia (<https://nasional.kontan.co.id/>).

Agar integritas laporan keuangan tercapai maka perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kasus manipulasi data keuangan yang banyak terjadi dapat membuktikan bahwa kurang integritasnya laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan dan terbuktinya masalah manipulasi data akuntansi dapat menyebabkan timbulnya banyak pertanyaan bagi masyarakat luas terhadap berbagai pihak terutama sistem pengelolaan dalam perusahaan dan sistem kepemilikan yang tersebar secara luas yang sering disebut dengan istilah *corporate governance*, yang memberitahukan kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan pada perusahaan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.

Faktor pertama yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu kepemilikan institusional. Semakin tinggi presentase saham institusi maka semakin tinggi pula integritas laporan keuangan. Dengan kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan terdapat konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Istiantoro dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Budiarto (2017), Mudasetia dan Solikhah (2017), dan Qonitin dan Yudowati (2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah sebagai presentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istiantoro dkk (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diduga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan skala besar akan dihadapkan dengan situasi di mana tuntutan terhadap perusahaan akan semakin besar dari para pemangku kepentingan dalam menyajikan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Melyawati (2017) yang menyimpulkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu ukuran KAP. Ukuran KAP merupakan suatu badan yang dibentuk oleh perorangan yang bertujuan untuk mengaudit laporan keuangan. Faktor ukuran dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dimandatkan untuk memeriksa laporan

tersebut. Dikatakan demikian karena ukuran KAP mempunyai hubungan dengan kualitas audit yang dilakukan semakin besar ukuran KAP maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. KAP yang besar dianggap mempunyai tanggungjawab yang lebih besar atas hasil auditnya karena KAP besar mempunyai nama baik yang harus dijaga. Dengan kata lain independensinya perlu dijaga. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julius (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan pertama mengenai penelitian yang dilakukan Julius (2020) menggunakan tiga variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran KAP sedangkan penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel tersebut karena pada penelitian Julius (2020) telah disarankan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, salah satunya adalah variabel ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel ukuran perusahaan karena perusahaan yang mempunyai aset yang besar akan melakukan hal yang membuat investor tertarik untuk berinvestasi diperusahaan tersebut salah satunya yaitu melaporkan laporan sesuai dengan keadaan yang terjadi diperusahaan sehingga akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Perbedaan kedua pada penelitian Julius (2020) penelitian pada tahun 2015-2018 sedangkan penelitian ini pada tahun 2016-2020 dan alasan penggunaan perusahaan BUMN karena perusahaan BUMN merupakan badan usaha milik negara dimana pengelolaannya dilakukan oleh negara sehingga jika perusahaan memiliki tingkat integritas laporan

keuangan yang baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara sekaligus dapat dijadikan publik sebagai bahan pertimbangan dan penilaian jika akan berinvestasi di perusahaan BUMN.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)”**

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus pokok permasalahan yang ada dan sesuai sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.
2. Variabel independen yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Integritas Laporan Keuangan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan.
2. Menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan.
3. Menguji secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan.
4. Menguji secara empiris pengaruh Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan investor untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan dipilih untuk berinvestasi.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan pemerintah tentang integritas laporan keuangan misalnya penerapan batasan integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN.

